

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian termasuk sebuah konsep penting dalam ilmu ekonomi yang mengacu pada peningkatan kuantitas dalam memproduksi barang serta jasa pada sebuah negara ataupun wilayah dalam rentang periode tertentu. Indonesia yang mana termasuk negara berkembang perlu untuk selalu berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan pembangunan nasional. Pertumbuhan Ekonomi juga pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Produk*) bukan sekedar bertambah dan berkesinambungan, tapi menyeluruh dan merata. Sebab pertumbuhan ekonomi perlu berkualitas dan tersalurkan dengan rata seluruh lapisan penduduk (Fadillah, 2021).

Perekonomian suatu wilayah akan terus mengalami kenaikan ketika adanya penambahan pada faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dalam bentuk PDB (Produk Domestik Bruto) secara total dengan dibagi jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi juga bisa didefinisikan sebagai kenaikan keahlian pada kurun waktu tertentu oleh negara dalam menyediakan berbagai ragam produk untuk masyarakat (Ambarwati et al., 2021). Serta pada tingkat pendapatan daerah ataupun provinsi, pertumbuhan ekonominya dapat diukur dalam bentuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Berikut pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2013-2022 dilihat dari laju PDB.



**Gambar 1. 1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (persen) Tahun 2013-2022**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2013-2022, (data diolah 2023).*

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2013-2022 mengalami fluktuasi. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 hanya sebesar 2,07 %. Hal ini bisa terjadi karena adanya guncangan ekonomi yang sedang terjadi yaitu adanya pandemi covid-19, sehingga pertumbuhan PDB mengalami keanjlokkan di seluruh negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik dan terus mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 5,31 %.

Pertumbuhan perekonomian menjadi salah satu tolak ukur majunya suatu negara. Dikatakan maju suatu negara yaitu ketika perekonomian di negara tersebut selalu dalam keadaan yang stabil, begitu juga sebaliknya apabila keadaan perekonomiannya masih terpuruk menandakan belum majunya negara tersebut. Adapun terealisasinya sebuah pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah yang lebih baik maka akan tumbuhnya kesejahteraan secara luas bagi masyarakatnya. Perencanaan dalam upaya untuk menggapai masyarakat luas yang sejahtera, maka perlu terciptanya pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pendistribusian pendapatan. Oleh karena itu, tak dapat dielakkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi memerankan sebagai parameter utama untuk kejayaan pengembangan ekonomi (Aristina et al., 2020)

Banyak faktor dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti laju inflasi, teknologi yang semakin berkembang, sumber daya manusia, konsumsi pada masyarakat, pendapatan dan belanja dalam pemerintahan. Sebagaimana kewenangan pemerintah negara maupun daerah yakni memiliki tanggungjawab dalam pembuatan kebijakan, yang salah satunya dalam hal mengatur berbagai sumber pendapatan negara atau daerah yang kemudian digunakan untuk segala kebutuhan yang berkaitan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan warganya (Lin & Layaman, 2023).

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya akan selalu berkesinambungan secara langsung untuk mempengaruhi kegiatan masyarakat di bidang ekonomi (Siregar, 2021). Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan dalam jangka pendek atau jangka panjang guna

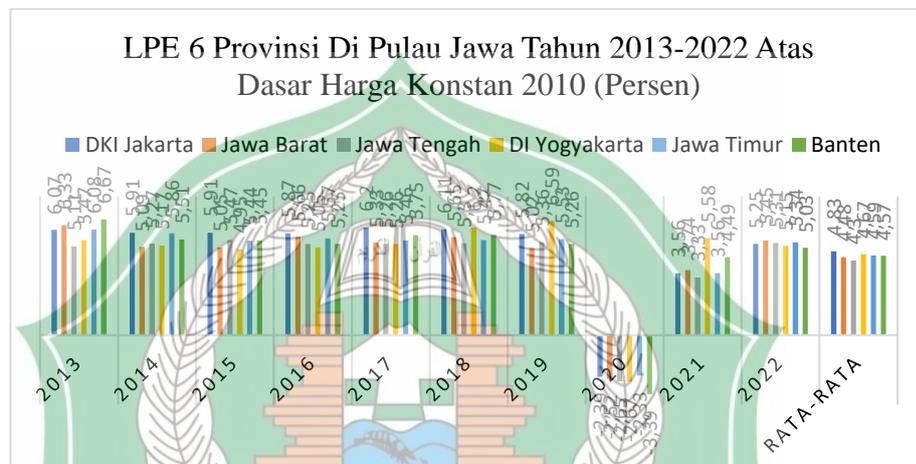
terrealisasinya laju perekonomian yang membaik suatu negara maupun pada daerah maka dibutuhkan adanya langkah pemerintah melalui kebijakan yang berkaitan dalam hal ini seperti: mengurangi angka pengangguran, mengatasi permasalahan inflasi yang terjadi serta mempercepat aktivitas perekonomian (Azimi, 2021).

Dalam upaya mewujudkan arah perekonomian agar tumbuh lebih baik, maka pengelolaan anggaran daerah yang diimplementasikan melalui kebijakan fiskal menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah (Ompusunggu et al., 2024). Terdapat beberapa faktor terkait dari adanya penerepan kebijakan fiskal yang baik sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian suatu daerah seperti adanya ketersediaan lapangan pekerjaan pada sektor ekonomi, transparansi dalam pemerintahan, struktur pengeluaran oleh pemerintah, pendapatan pemerintah, atau sekalipun terkait keadaan pada pemerintahan (Ma'ruf & Andriansyah, 2022).

Ketetapan pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal tercantum dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana memiliki 3 faktor penting yang diantaranya yaitu pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan pengeluaran pemerintah. Pada pendapatan daerah didalamnya memuat pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan sah lainnya. Sedangkan dalam belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Selanjutnya pada pembiayaan daerah terdapat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam penelitian ini, kebijakan fiskal yang dimaksud dibatasi menjadi beberapa variabel yaitu terkait pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan dana alokasi umum yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut perlu dibahas karena ketika pemerintah daerah kurang produktif dalam mengelola APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maka akan memperlambat pembangunan ekonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk produktif dalam mengatur belanja daerah dengan memanajemen sumber-sumber pendapatan daerah yang ada.

Upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataannya, suatu daerah mempunyai peranan yang penting untuk mengelola produktifitas perekonomian di setiap daerahnya. Sebagaimana di Pulau Jawa dengan 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten yang memiliki partisipasi besar dalam perekonomian nasional dibandingkan Pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2013-2022 berdasarkan harga konstan 2010.



**Gambar 1. 2**  
**LPE 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2022**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2013-2022, (data diolah 2023).*

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi pada enam Provinsi di Pulau Jawa. Dari data tersebut terlihat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat cukup fluktuatif selama 2013-2022 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,48 %, angka tersebut masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 4,83 %. Di tahun 2020, 6 Provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena dampak pandemi covid-19. Selanjutnya, di tahun 2022 Provinsi Jawa Barat menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi dari 6 Provinsi di Pulau Jawa yaitu sebesar 5,45%.

Provinsi Jawa Barat termasuk daerah dengan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang terbilang tinggi setelah DKI Jakarta. Besaran kapasitas fiskalnya yakni sebesar 2,456 berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah provinsi

menurut data laporan Kementerian Keuangan tahun 2023. Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi diartikan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan yang bagus dalam membiayai berbagai pengeluaran pemerintahan dari sumber penerimaan daerahnya, baik dari pajak ataupun pendapatan asli daerahnya. Tetapi, kondisi penerapan kebijakan fiskal di Jawa Barat tersebut berbanding terbalik dengan kondisi perekonomiannya, yang mana dilihat dari presentase rata-rata laju pertumbuhan ekonomi, Provinsi Jawa Barat berada di posisi ke-5 dari 6 Provinsi di Pulau Jawa, artinya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dilihat berdasarkan data statistik masih tertinggal.

Kondisi tersebut tentu harus mendapatkan perhatian yang khusus pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat memiliki sumbangsih yang cukup besar bagi Indonesia. Walaupun di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan drastis sebesar -2,52 dikarenakan dampak pandemi covid-19 dan penurunan tersebut juga dialami oleh daerah-daerah lain. Akan tetapi, di tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi terutama di Provinsi Jawa Barat mulai stabil.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah-daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sebagai tujuan agar kemandirian daerah tersebut agar semakin meningkat. Upaya tersebut dapat dicapai dengan pengoptimalan dari potensi pendapatan daerah yang mana sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dikendalikan dengan baik, serta untuk terciptanya kompetisi antar daerah yang sehat demi meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Karena desentralisasi fiskal dapat memeberikan perubahan yang berarti untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Mokorowu et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan fiskal digunakan dalam penelitian ini sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut gambaran mengenai perkembangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat khususnya dari segi pertumbuhan ekonomi, Penerimaan pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta dari sisi pengeluaran pemerintah sebagai berikut.

**Tabel 1. 1**  
**PDRB, Penerimaan Pajak, DAU dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022**

Tahun	PDRB (Milyar Rp)	Penerimaan Pajak (Milyar Rp)	Dana Alokasi Umum (Milyar Rp)	Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rp)
2013	1.093	11.23	2.712	17.51
2014	1.149	13.75	1.687	20.79
2015	1.207	14.61	1.303	24.64
2016	1.275	15.72	1.248	27.62
2017	1.343	16.48	2.992	24.16
2018	1.419	18.15	3.023	33.11
2019	1.490	19.62	3.212	35.83
2020	1.453	17.03	2.964	38.12
2021	1.507	18.84	3.007	44.61
2022	1.589	19.75	3.015	34.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (data diolah 2023).

Pada Tabel 1.1 diatas terlihat selama periode pengkajian ini, perekonomian Jawa Barat melalui tingkat PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dilihat dari lapangan usaha di Provinsi Jawa Barat menunjukkan terjadi fluktuasi. Dari tahun 2013-2019 selalu meningkat, namun di tahun 2020 PDRB Provinsi Jawa Barat menurun menjadi Rp 1.453 Triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.490 Triliun, dimana kondisi tersebut diakibatkan adanya wabah covid-19 yang mana di tahun tersebut termasuk di Indonesia dan daerah-daerah didalamnya terdampak kemerosotan ekstrem dalam perekonomian. Akan tetapi, PDRB Jawa Barat di tahun 2021 mulai membaik sampai di Tahun 2022 PDRB Jawa Barat meningkat sebesar Rp 1.589 Triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 %.

Adapun sektor yang mempunyai kontribusi unggul dalam mendorong tumbuhnya perekonomian di Jawa Barat ialah di bidang industri pengolahan. Fluktuasi perekonomian Jawa Barat tersebut juga sepadan dengan terdapatnya fluktuasi perekonomian nasional yang dilihat dari PDB selama

sepuluh tahun terakhir. Keadaan tersebut memperlihatkan pemerintah masih belum maksimal dalam melaksanakan beberapa fungsinya, salah satunya pada penerapan kebijakan fiskal daerah yakni terkait manajemen pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Berlandaskan dalam teori yakni pada paham Keynes yang menyatakan bahwasannya penerapan kebijakan fiskal yang mana termasuk didalamnya upaya dalam memajemen anggaran dari penerimaan dan untuk pengeluaran pemerintah akan berdampak dalam mendorong terjadinya pertumbuhan perekonomian agar menjadi lebih baik yang mana peranan pemerintah dalam hal inipun begitu penting (Eva et al., 2020).

Dari segi penerimaan pemerintah, penerimaan pajak daerah ialah pembayaran yang diwajibkan bagi perorangan atau badan kepada pemerintah daerah yang menuntu dan tanpa kompensasi secara langsung yang sebanding serta berdasar pada peraturan undang-undang yang sudah diberlakukan dan hasil penerimaan tersebut dialokasikan guna mendanai pengelolaan dalam pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, agar dana penerimaan pajak dapat berdampak penting untuk terealisasinya peningkatan perokonomian daerah maka pemerintah pun perlu menggunakan pajak tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah dan dialokasikan dengan tepat, karena penerimaan pajak menjadi sumber utama baik bagi penerimaan pemerintah pusat maupun daerah. Ketika kesadaran masyarakat suatu daerah terhadap wajib pajak masih rendah atau kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat terkait pajak, maka hal tersebut akan berakibat pada menurunnya pendapatan daerah dan tidak secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah (Bintary, 2020).

Penerimaan pajak di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2022 yang terlihat dalam Tabel 1.1 yang menjabarkan data penerimaan pajak Provinsi Jawa Barat terjadi peningkatan dari tahun 2013 sampai di tahun 2019 sebesar Rp 19.62 Milyar. Tapi di tahun 2020 menurun menjadi Rp 17.03 Milyar. Sampai di tahun 2022 meningkat sebesar Rp 19.75 Milyar.

Selain penerimaan dari pajak daerah, penerimaan pemerintah juga terdapat dari dana transfer pemerintah pusat untuk pemerintah daerah atau

disebut dana perimbangan yang salah satunya yaitu dana alokasi umum. Membiayai kebutuhan daerah yang dijalankan sebagai bentuk pemerataan kesanggupan antar daerah-daerah menjadi tujuan dari pengalokasian dana alokasi umum yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tabel 1.1 menunjukkan dana alokasi umum sepanjang tahun 2013-2022 dan yang menempati penerimaan DAU terbesar yaitu di tahun 2019 sebesar Rp 3.212 Milyar.

Peningkatan kegiatan pembangunan di suatu daerah dapat dilihat melalui pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pengeluaran oleh pemerintahan menjadi salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal untuk menstabilkan aktivitas perekonomian. Meningkatnya pengeluaran oleh pemerintahan daerah menjadi harapan agar berdampak baik bagi aktivitas perekonomian daerah yang semakin meningkat. Belanja pemerintah daerah diukur dengan menjumlahkan belanja rutin (belanja pegawai, subsidi, hibah, dll) dan pengeluaran pembangunan (belanja modal, barang jasa, dll). Dilihat dari data pada Tabel 1.1 pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan di tahun 2013 sampai di 2016 sebesar Rp 27,62 Triliun dan menurun di tahun 2017 menjadi Rp 24,16 Triliun. Akan tetapi, pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengalami kenaikan sampai di tahun 2022 sebesar Rp 34,00 Triliun yang terdiri dari pengeluaran pembangunan hanya sebesar Rp 2,47 Triliun, dimana lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran rutin yang sebesar Rp 31,5 Triliun.

Hal tersebut berarti alokasi belanja pemerintah daerah masih lebih banyak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat operasional daerah seperti gaji pegawai, subsidi, hibah, dll. Kebijakan pemerintah seharusnya mengarah untuk lebih fokus dalam kegiatan perekonomian seperti belanja modal, pengembangan infrastruktur, dll., dikarenakan semakin besar belanja yang efektif suatu pemerintah daerah, diharapkan semakin meningkat juga perekonomian daerahnya. Demikian juga dengan penerimaan daerah, ketika pemerintah memiliki kreatifitas dalam mengatur penerimaan pajak dan alokasi dana umum serta dapat mengatur belanja daerah secara produktif maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat akan stabil.

Sebagaimana fenomena terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang sudah dipaparkan di sebelumnya, sehingga penulis berminat untuk melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana **“Pengaruh Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2013-2022 mengalami fluktuasi. Di mana selama 10 tahun terakhir, tingkat perkembangan ekonomi Indonesia yang dilihat dari informasi nilai total output nasional (Produk Domestik Bruto) telah mengalami penurunan secara relevan, yang terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Produk Domestik Bruto hanya sebesar 2,07%.
- 2) Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat berada di posisi ke-5 dari 6 Provinsi di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dilihat berdasarkan data statistik masih tertinggal.
- 3) Di tahun 2020, 6 Provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena dampak pandemi covid-19.
- 4) Ketika kesadaran masyarakat suatu daerah terhadap wajib pajak masih rendah atau kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat terkait pajak, maka akan berakibat pada menurunnya pendapatan daerah dan secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
- 5) Alokasi belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat masih lebih banyak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat operasional daerah seperti gaji pegawai, subsidi, hibah, dll.
- 6) Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Barat di tahun 2014-2016 selalu mengalami penurunan, begitu juga terjadi di tahun 2020.

### C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu merambatnya masalah dan tak keluar batas dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta bisa mengungkap pengertian yang terarah serta selaras sesuai yang dituju, maka untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, sehingga berikut penulis menetapkan batas permasalahannya yakni berikut ini:

- 1) Penelitian ini hanya mengangkat topik yang terkait dengan pengaruh penerimaan pajak, dana alokasi umum, dan penerimaan pemerintah terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.
- 2) Data yang dipergunakan pada penelitian yaitu data Laju PDRB berdasar pada harga konstan 2010 sesuai lapangan usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022 (Milyar Rp) yang mewakili variabel pertumbuhan ekonomi. Data Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2013-2022 (Dalam Ribu Rupiah) yaitu diambil data sumber penerimaan pajak daerah (Milyar Rupiah) dan Dana Alokasi Umum (Milyar Rupiah). Serta data Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasar Jenis Belanja (ribu rupiah) tahun 2013-2022.

### D. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, akhirnya diperoleh rumusan permasalahan pada pengkajian ini yang diantaranya:

- 1) Bagaimana pengaruh penerimaan pajak secara persial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022?
- 2) Bagaimana pengaruh dana alokasi umum secara persial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022?
- 3) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah secara persial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022?

- 4) Bagaimana pengaruh penerimaan pajak, dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari pengkajian ini diantaranya yaitu:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak secara persial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum secara persial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara persial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak, dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.

### **F. Manfaat Penelitian**

Output dari pengkajian ini diharapkan bisa menyampaikan kebermanfaatannya baik secara praktis ataupun teoritis. Kedua kegunaan tersebut dijelaskan, sebagai berikut:

- 1) Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai gambaran tentang bagaimana pengaruh penerimaan pajak, Dana Alokasi Umum dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, serta sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah khususnya untuk meningkatkan dan menstabilkan perekonomian di Provinsi Jawa Barat.

- 2) Manfaat Teoritis

Hasil temuan pada penelitian ini bisa menambah wawasan dan memberi kontribusi terkait pengembangan ilmu dalam perekonomian serta khususnya terkait pembahasan penerimaan pajak, Dana Alokasi Umum dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Jawa Barat, serta memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan daerah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Supaya penyusunan kepenulisan ini tercatat secara struktur juga untuk memudahkan pengetahuan, sehingga disusunlah sebuah sistematika kepenulisan yang diantaranya terdiri dari:

##### **BAB I PENDAHULUAN:**

Pendahuluan mencakup bahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

##### **BAB II KAJIAN TEORI:**

Berisi tentang teori dasar yang mendasari penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.

##### **BAB III METODE PENELITIAN:**

Metodologi Penelitian terdiri dari jenis penelitian, operasional variabel, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

##### **BAB IV HASIL ANALISIS:**

Mengkaji tentang deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

##### **BAB V PENUTUP:**

Mengkaji tentang pernyataan sederhana berupa kesimpulan dan inti pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini serta saran.